

TAJUK RENCANA

Kado Tahun Baru dari Presiden Prabowo

APRESIASI layak dihaturkan pada Presiden Prabowo Subianto karena tetap memberlakukan kebijakan diskon listrik selama Januari – Februari 2025. Kebijakan yang semula untuk meringankan beban masyarakat pascakenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% ini tetap diberlakukan, meski kenaikan pajak itu dibatalkan. Sebagaimana diumumkan Presiden Prabowo, kenaikan pajak dari 11% menjadi 12% hanya untuk barang-barang mewah, tidak semuanya terkena, apalagi sembako .

Upaya meringankan beban masyarakat ini diungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers pertengahan Desember lalu akan menyasar sekitar 81,4 juta pelanggan rumahtangga atau sekitar 97% total pelanggan PLN. Meski diskon hanya berlaku dua bulan Januari – Februari dalam siaran persnya Darmawan meminta pelanggan prabayar yang membeli token listrik tidak perlu terburu-buru. Mengingat diskon akan diberlakukan sepanjang bulan. (KR, 4/1).

Diskon yang diberikan awal tahun ini sejatinya merupakan bagian Paket Stimulus Ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan ekonomi nasional. Langkah ini tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat akibat kenaikan PPN, tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi domestik. Saat menyampaikan pembatalan kenaikan PPN 12% di Kementerian Keuangan (31/12/2024), Presiden tegas menyebutkan : *”Pemerintah telah berkomitmen memberikan solusi berupa paket stimulus. Nilai stimulus yang digelontorkan Rp 38,6 triliun.”.*

Melemahnya daya beli masyarakat, sudah muncul sejak beberapa bulan terakhir. Jika dibiarkan, apa yang terjadi menjadi sesuatu hal yang cukup mengkhawatirkan di negeri ini. Pasalnya melemahnya daya beli dapat menggerogoti otot-otot ekonomi. Ini sungguh berbahaya. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi konsumsi rumah tangga yang tertahan sepanjang 2024 akibat kemampuan belanja masyarakat yang rendah.

Tetap diberlakukannya Paket Stimulus Ekonomi ini, membuat

banyak pihak menilai kebijakan ini merupakan langkah positif mendukung daya beli masyarakat, khususnya pelanggan rumahtangga dengan daya rendah. Kado tahun baru dari Presiden Prabowo ini disambut gembira warga masyarakat. Jika kita ikuti dalam wawancara baik di media cetak maupun televisi terungkap, warga mengaku dapat memanfaatkan penghasilan untuk keperluan lain. Di tengah beban ekonomi yang kian menanjak.

Kebijakan diskon listrik 50% menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil dan menengah – mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta – Rp 5 juta per bulan — sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Inilah kebijakan publik yang pro-rakyat dan membuat gembira warga masyarakat. Meski hanya dua bulan, kebijakan diskon listrik 50% dapat menjadi bukti komitmen pemerintah melindungi masyarakat kecil dan menengah. Visi prioritas kesejahteraan rakyat berhasil diterjemahkan PLN di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah.

Sekali lagi, masyarakat antusias menyambut kado tahun baru dari Presiden Prabowo. Bahkan tidak sedikit yang berharap agar hal ini berlanjut dan tidak hanya berhenti dua bulan saja. Sebuah pemikiran yang wajar. Namun hendaknya masyarakat juga berfikir dan ikut menjaga agar kebijakan tidak membebani keuangan PLN jangka panjang. Harus dipikirkan mengenai pemeliharaan infrastruktur, kestabilan pasokan listrik dan tentu juga operasional PLN.

Tidak kalah penting mendapat perhatian adalah apakah kebijakan diskon listrik 50% ini mampu memompa daya beli masyarakat sebagaimana tujuannya? Jangan lupa, kelompok menengah ke bawah sekarang cenderung hati-hati membelanjakan uangnya. Bukankah semua ini dapat membuat putaran roda ekonomi kian lambat?. Apalagi kian bertambah jumlah pekerja yang terkena PHK sekarang ini.

Tanpa meninggalkan optimis, kita memang tetap harus waspada menapak di tahun 2025. Ingat, kado tentu tidak akan diberikan sepanjang tahun!. □f

Hilangnya ‘Presidential Threshold’

MAHKAMAH Konstitusi (MK) seperti tengah memberi kado tahun baru, berupa keputusan penting, yakni menghapus ambang batas 20% dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden. Sebelumnya, para akademisi dan aktivis, terus berusaha menembus pagar dengan berbagai argumen, dan selalu kandas. Selama satu dekade (2014-2024), rakyat disajikan “hidangan” yang terbatas, dan akibatnya pemilu berjalan keras, karena calon hanya dua. Pembelahan politik menjadi tidak terhindarkan, dan akibatnya residu politik berlangsung lama, bahkan mungkin sisa-sisanya bisa dirasakan hingga kini.

Apa sebenarnya dampak yang paling tidak diinginkan dengan adanya pembatasan melalui *presidential threshold*? Yakni suatu kenyataan bahwa rakyat tidak punya pilihan atau pilihan yang sangat terbatas. Akibatnya terbuka peluang di mana rakyat sebenarnya tidak memilih, tetapi menggunakan hak pilihnya sekadar untuk menghalangi yang tidak diinginkannya. Jadi, suara yang diberikan di TPS, bukan suara mendukung kandidat X, melainkan tidak ingin Y yang menang, dengan cara memberikan suara ke X.

Bahkan, jika diamati dengan lebih seksama, pola dimaksud juga masih dapat dirasakan pada Pilpres 2024 dan Pilkada serentak 2024. Partai-partai, dalam persepsi publik, lebih nampak sebagai pintu masuk, karena pada prakteknya, struktur partai diketahui tidak menjadi penopang proses kontestasi. Karena itu pula, arena pertarungan bukan dalam hidup nyata warga, melainkan melalui media sosial. Dan akibatnya, yang lebih banyak bekerja dalam sentimen, ketimbang pertimbangan-pertimbangan saintifik berbasis data.

Hal ini yang mungkin menjelaskan mengapa politik uang masih marak dan makin tidak menjadi masalah, atau dianggap sebagai keharusan. Akibatnya hasil pemilu tidak disambut dengan antusias, karena telah mendapatkan hasil terbaik, tetapi biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Mengapa, karena para pemenang umumnya adalah mereka yang mam-

Syamsudin

pu “menggerakkan kapital” dalam jumlah besar, yang setidaknya tampil dalam dua bentuk: (1) apa yang disebut publik sebagai “memborong” partai; (2) apa yang tampak sebagai banjir papan reklame; dan (3) apa yang dirasakan sebagai bekerjanya politik uang.

Dari kesemua itu hendak dikatakan bahwa pemilu yang seharusnya menjadi wahana rakyat untuk ikut menen-



KR-JOKO SANTOSO

tukan arah pemerintahan telah kehilangan maknanya, karena hasil pemilu tidak sepenuhnya dapat dihap-rapkan. Artinya, mekanisme atau prosedur demokrasi, justru mengkhianati substansi demokrasi itu sendiri. Keadaan inilah yang nampaknya tengah mendapatkan koreksi awal, yakni suatu koreksi yang hendak meluruskan jalan mencapai substansi demokrasi. Apa yang diputuskan MK adalah awalnya. Tantangannya, bagaimana rakyat menyambutnya? Pada titik inilah peran kampus menjadi sangat menentukan.

Kampus

Ada dua tantangan yang segera muncul: (1) apakah partai politik dan pemerintah, benar-benar siap terhadap keputusan tersebut dan dengan demikian melakukan penyesuaian-

penyesuaian? Dan (2) apakah masyarakat kebanyakan telah benar-benar siap, sehingga pada hari H akan menjadi pemilih rasional, yakni menggunakan hak pilihnya untuk melakukan koreksi atas perjalanan bangsa yang belum kunjung menghadirkan keadilan sosial.

Pada titik ini, kampus seharusnya bisa mengambil peran, yakni: Pertama, mengadakan riset kolaboratif, terutama untuk memeriksa problem yang terkait dengan keputusan strategis tersebut, terutama dalam kerangka melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem rekrutmen politik nasional. Kedua, menyiapkan kurikulum pendidikan secara kolaboratif melibatkan seluruh institusi pendidikan, masyarakat politik dan *civil society*. Arahnya adalah meningkatkan kapabilitas warga dalam mengambil keputusan politik.

Kedua hal tersebut tentu hanya bagian kecil dan bagian awal dari peran yang dapat diberikan kampus. Dari kedua hal tersebut kita bisa berharap terbentuknya suatu ekosistem politik, yang membuat proses politik menjadi proses normal, sehingga hanya yang mampu dari segi kapasitas kepemimpinan, intelektual dan moral, serta diterima masyarakat, yang selayaknya mengikuti kontestasi. Istilah NPWP, *Nomor Piro, Wani Piro*, hendaknya menjadi masa lalu. Karena tidak ada satu pihak pun yang akan menjadikan momen pemilu menjadi ajang transaksi, yang ujungnya kesuraman masa depan bangsa. □f

**) Syamsudin MA, Dekan Fisipol UP’45.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilk-an fotocopy identitas. Terimakasih.

‘Debt Switching’

MENURUT catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat Surat Berharga Negara (SBN) seri *variable rate* yang khusus dijual kepada Bank Indonesia (BI) di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2025 senilai Rp 100 triliun, 2026 senilai Rp 154,5 triliun, 2027 senilai Rp 154,5 triliun, 2028 senilai Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp 51,5 triliun. Pemerintah dan BI telah menyepakati bahwa utang *burden sharing* sebesar Rp 100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 akan dibayar melalui mekanisme *debt switching*, yaitu mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Melalui kebijakan tersebut, BI diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan. Mekanisme *burden sharing* dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan sinergi fiskal-moneter yang telah terbukti Indonesia berhasil keluar dari krisis Pandemi Covid-19 lebih cepat *recovery*-nya dibandingkan negara-negara lain (Badrudin, 2024).

Mekanisme *debt switching* dilakukan dengan cara BI akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025 melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral *debt switch* antara pemerintah dan BI atas dasar *burden sharing* yang jatuh tempo pada 2025, yaitu sebesar Rp 100 triliun. Mekanisme *debt switch* dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal sambil memenuhi kewajiban pembayaran hingga 2029.

Mengapa *debt switching* dipilih? *Debt switching* adalah strategi keuangan di mana pemerintah mengganti utang lama dengan utang baru dengan cara memberikan obligasi

Catur Sugiyanto dan Rudy Badrudin

baru untuk melunasi atau menukar obligasi lama, sehingga dapat mengelola stabilitas fiskal, menurunkan beban bunga, dan mengurangi risiko utang jangka pendek atau dalam mata uang asing. Melalui mekanisme *debt switching* pengelolaan utang menjadi lebih kompleks mengingat jangka waktu yang lebih panjang dan tentunya imbal bunga juga semakin tinggi. Pilihan *debt switching* memungkinkan pemerintah memprioritaskan anggaran belanja dalam APBN untuk berbagai program produktif.

Apakah Indonesia akan menjadi pengutang sepanjang masa kalau menunda terus. Analisis *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan bahwa menunda pembayaran utang melalui mekanisme *debt switching* tidak otomatis menyebabkan Indonesia memiliki utang selamanya, namun dapat memperpanjang profil jatuh tempo utang. Dalam laporan ADB (RRP INO 54139-001), manajemen utang Indonesia dinilai tetap berkelanjutan dengan risiko terkendali, meskipun membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Strategi ini membantu mengurangi tekanan anggaran dalam jangka pendek, meski tetap harus disertai dengan langkah pengurangan defisit atau peningkatan pendapatan negara.

Berdasar pengalaman pemerintah Indonesia dalam melakukan mekanisme *debt switching* dari waktu ke waktu, nampak relatif terkendali. Periode 2002-2004, pemerintah melakukan *debt switching* dengan cara surat utang lama dengan suku bunga tinggi ditukar dengan obligasi baru yang lebih efisien. Periode 2010-2014, pemerintah melakukan beberapa kali *debt switching* untuk memperpanjang jatuh tempo surat utang. Periode 2015-2018, pemerintah menerbitkan surat utang baru untuk menggantikan obligasi lama yang jatuh tempo, dengan fokus pada

pengendalian defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi. Periode 2020-2023, *debt switching* digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat pandemi dengan fokus utama mengurangi beban bunga jangka pendek dan memperpanjang tenor utang demi menjaga keberlanjutan fiskal.

Mekanisme *debt switching* merupakan bentuk nyata sinergi fiskal-moneter yang harus terus ditingkatkan melalui forum koordinasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antarotoritas Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi fiskal-moneter sangat penting karena Indonesia berada dalam kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju akibat ketegangan politik di Timur Tengah yang tentunya akan berdampak dalam capaian pertumbuhan ekonomi inklusif. □f

**) Prof Dr Catur Sugiyanto MA (Dosen Tetap FEB UGM, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta) dan Dr Rudy Badrudin MSI (Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama.*

Pojok KR

Ketua IPHI mengingatkan, persoalan lingkungan belum selesai
-- Bahkan tidak akan pernah selesai

Ada ancaman bencana, gotong royong dan ronda diaktifkan
-- Waspada!

Pojok Baca Digital di Terminal Tidar Kota Magelang
-- Ini bukan tempat ‘mojom’ lho.....

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/IIUPPA/7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampion MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk “Kedaulatan Rakyat Minggu”... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Gungo Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.